

BAB IV

KEBIJAKAN LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT MASA PRESIDEN BARACK OBAMA ATAS KEPEMILIKAN NUKLIR KOREA UTARA

Presiden Barack Husein Obama, adalah seorang politisi yang lahir di Honolulu, Hawaii pada tanggal 4 Agustus 1961. Merupakan presiden Amerika Serikat yang ke-44. Awal berkecimpungnya Obama di dunia politik adalah ketika dia terpilih sebagai anggota Senat Illinois pada tahun 1996 sebagai senator dari distrik ke-13 Illinois, yang mana lokasinya mencakup pemukiman South Side Chicago dari Hyde Park Kenwood ke selatan hingga South Shore dan barat hingga Chicago Lawn (Jackson & Long, 2007). Dari terpilihnya tersebut, Obama mendapat dukungan dari kedua partai atas undang-undang reformasi hukum etika dan pelayanan kesehatan (Slevin, 2007).

Kemudian terpilih kembali sebagai Senator Illinois pada tahun 1998, kemenangan tersebut mengalahkan Yesse Yehudah dari Partai Republik, kemudian terpilih lagi pada tahun 2002, walaupun sempat kalah pada tahun 2000 dalam pemilihan umum untuk distrik kongres ke-1 Illinois di Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat. Kemudian Obama menjadi ketua dari Komite Pelayanan Kesehatan dan Masyarakat Senat Illinois pada bulan Januari 2003 setelah Demokrat dapat merebut kembali suara mayoritas setelah menjadi minoritas selama satu dasawarsa (Calmes, 2007).

Selama kampanye pemilu Senat Amerika Serikat tahun 2004, perwakilan polisi memuji Obama atas terlibat aktifnya dia bersama organisasi polisi dengan menerapkan reformasi hukuman mati (Youngman & Blake, 2007). Setelah Obama terpilih menjadi anggota Senat Amerika Serikat, dia pun mengundurkan diri dari Senat Illinois pada bulan November 2004. Tugas yang diemban Obama di Komite Senat yaitu untuk Hubungan Luar Negeri, Lingkungan dan Pekerjaan Umum, dan Urusan Veteran sepanjang tahun 2006 (obama.senate.gov,

2006). Namun pada bulan Januari 2007, Obama mengundurkan diri dari Komite Lingkungan dan Pekerjaan Umum dengan melakukan tugas tambahan dalam Komite kesehatan, pendidikan, buruh, dan pensiun. Selain itu juga dalam bidang Keamanan Dalam Negeri dan Urusan Pemerintahan, serta menjadi subkomite Senat untuk urusan Eropa. Sebagai anggota Komite Hubungan Luar Negeri Senat, Obama telah melakukan serangkaian kunjungan resmi ke Eropa Timur, Timur Tengah, Asia Tengah, dan Afrika. Obama bertemu dengan Mahmoud Abbas sebelum menjadi Presiden Otoritas Nasional Palestina dan berpidato di Universitas Nairobi sambil mengutuk korupsi yang ada di tubuh negara Kenya (Larson, 2006).

Obama menyatakan atas pencalonannya sebagai Presiden Amerika Serikat pada tanggal 10 Februari 2007 di depan gedung Old State Capitol di Springfield, Illinois (Pearson, 2007). Dalam pernyataan tersebut, Obama ingin menekan isu pengakhiran Perang Irak secepat mungkin, meningkatkan kebebasan energi, dan menyediakan layanan kesehatan universal. Dalam kampanye tersebut mengusung tema harapan dan perubahan. Sebenarnya dari Partai Demokrat terdapat calon selain Obama, namun dalam pemilihan pendahuluan presiden Partai Demokrat yang mana Obama melawan Senator Hillary Rodham Clinton lebih unggul dalam jumlah delegasi, karena perencanaan jangka panjang yang lebih baik, penggalangan dana kelas atas, dominasi di negara-negara bagian kaukus, dan pemanfaatan peraturan alokasi delegasi yang sangat rapi (Tumulty, 2008). Pada akhirnya tanggal 7 Juni 2008, Clinton mulai mengakhiri kampanyenya dan mendukung Obama untuk menjadi Presiden Amerika Serikat.

Selama proses pemilihan pendahuluan dan pemilihan umum berlangsung, dalam kampanye yang dilakukan Obama mencetak sejumlah rekor dalam penggalangan dana. Pada tanggal 19 Juni 2008, Obama menjadi kandidat presiden dari partai besar pertama yang menolak adanya pendanaan publik dalam pemilu. Obama dicalonkan dari kandidat Partai Demokrat melawan kandidat Jihn McCain dari Partai Republik.

Keduanya mengikuti tiga debat presiden pada bulan September dan Oktober 2008 . tanggal 4 November merupakan hari bersejarah bagi Amerika Serikat, yang mana Obama memenangkan pemilu dengan 365 suara elektoral dibandingkan dengan John McCain 173 suar, selain itu Obama juga memenangkan suara rakyat sebesar 52.9 persen dibanding John McCain sebesar 45.7 persen suara (Politics, 2009). Obama menjadi orang Afrika Amerika pertama yang menduduki jabatan sebagai Presiden di Amerika Serikat.

Pada hari-hari pertamanya Obama menjadi Presiden setelah pelantikan tanggal 20 Januari 2009, yaitu mengeluarkan kebijakan eksekutif dan memorandum presiden yang ditujukan untuk militer Amerika Serikat agar segera menyusun rencana penarikan tentara dari Iraq (Daily, 2009). Selain itu Obama juga mencabut penerapan kembali Mexico City Policy era Presiden Ronald Reagan oleh Presiden George W. Bush yang melarang bantuan federal untuk organisasi perencanaan keluarga internasional yang melakukan atau memberi dukungan konseling mengenai aborsi (Obama, 2009).

Rancangan undang-undang pertama yang disahkan oleh Obama adalah *Lilly Ledbetter Fair Pay Act of 2009*, yang mana kebijakan tersebut memperlonggar atas persyaratan batasan tuntutan hukum upah setara (Times, 2009). Lima hari setelah Obama membuat rancangan tersebut, dia menandatangani perizinan kembali *States Children's Health Insurance Program (CHIP)* untuk memberikan asuransi setidaknya sekitar 4 juta anak (Levey, 2009). Kemudian Obama juga menghapus kebijakan yang ada pada masa Presiden Bush yang membatasi pendanaan penelitian sel batang embrionik dan Obama berjanji akan membuat panduan ketat terhadap penelitian tersebut (CNN, 2009).

Rancangan kebijakan lainnya pada masa awal Presiden Obama menjabat yaitu:

- Pada tanggal 30 September 2009, pemerintahan Obama mengusulkan adanya peraturan baru terkait

pembangkit listrik, pabrik, dan penyulingan minyak untuk membatasi emisi gas rumah kaca serta untuk memperlambat terjadinya pemanasan global (Broder, 2009).

- Pada tanggal 8 Oktober 2009, Obama menandatangani Matthew Shepard and James Byrd, Jr. Hate Crimes Prevention Act, sebuah peraturan yang memperluas hukum kebencian federal Amerika Serikat 1969 supaya juga mencakup dalam kejahatan yang dilakukan karena jenis kelamin, orientasi seksual, identitas gender, atau kecacatan korban baik yang dipersepsikan atau yang benar-benar dialami (CNN, Obama signs hate crimes bill into law, 2009).
- Pada tanggal 30 Maret 2010, Presiden Obama menandatangani *Health Care and Education Reconciliation Act*, yaitu sebuah rancangan undang-undang rekonsiliasi yang mengakhiri proses pemberian subsidi oleh pemerintah federal terhadap bank-bank swasta guna menghapus pinjaman yang telah dijamin oleh pemerintah, menambah pemberian beasiswa *Pell Grant*, dan mengubah *Patient Protection and Affordable Care Act* (Parsons, 2010).
- Pada tanggal 22 Desember 2010, presiden Obama telah mengesahkan *Don't Ask, Don't Tell Repeal Act of 2010*, digunakan untuk memenuhi janji kampanye Obama pada tahun 2008 serta untuk mengakhiri kebijakan *Don't Ask, Don't Tell* tahun 1993 yang mencegah kaum gay dan lesbian berdinis secara bebas di Angkatan Bersenjata Amerika Serikat (Lee, 2010).
- Pada tanggal 7 Februari 2009, merupakan kebijakan ekonomi, yang mana Obama mengesahkan American Recovery and Reinvestment Act of 2009, merupakan paket stimulus ekonomi senilai USD 787 miliar untuk membantu pemulihan

ekonomi akibat adanya resesi global. Undang-undang tersebut mencakup untuk meningkatkan pengeluaran pemerintah untuk layanan kesehatan, infrastruktur, pendidikan, berbagai pengecualian dan insentif pajak, dan bantuan langsung individu yang dilaksanakan dalam kurun waktu beberapa tahun (CNN, Obama's remarks on signing the stimulus plan, 2009).

Untuk Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat pada masa ketika Barack Obama menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat, terutama yang dikhususkan untuk program nuklir Korea Utara yaitu:

A. Melakukan Strategi kesabaran (*Strategic Patience Approach*)

Pada tanggal 8 hingga 10 Desember 2009, para pejabat dari pemerintahan Barack Obama telah mengadakan pertemuan tingkat tinggi mereka dengan Pemerintahan Korea Utara di Pyongyang. Dari perwakilan Amerika Serikat dipimpin oleh Stephen Bosworth khusus perwakilan kebijakan Amerika Serikat, yang mana ia memberikan surat dari Presiden Obama untuk Kim Jong-Il. Merupakan hubungan tingkat tinggi pertama antara presiden Barack Obama dengan Pyongyang. Perwakilan Bosworth akan mencari kemungkinan apakah Pyongyang siap untuk kembali melakukan pembicaraan enam negara terkait program nuklir yang sempat terhenti sejak April 2009, namun tanpa pemberian imbalan apapun terhadap Pyongyang. Menurut pejabat senior Gedung Putih mengatakan bahwa kunjungan pertama Bosworth ke Korea Utara tidak bermaksud untuk melanjutkan perjanjian bilateral. Dari pertemuan tersebut memiliki tujuan untuk memutuskan apakah Korea Utara siap dan bersedia untuk kembali menjalankan pembicaraan enam negara dan memulai lagi diskusi serius terkait denuklirisasi nuklir di Semenanjung Korea (News, 2009). Namun dari pertemuan tersebut tidak memberikan hasil yang baik untuk Amerika Serikat dan juga negara sekitar.

Seringnya sikap yang sering berubah-ubah yang dilakukan Korea Utara terhadap Amerika Serikat, Obama harus menerapkan cara diplomasi yang bisa menyesuaikan sikap tersebut. Kebijakan *Strategic Patience* yakni kebijakan yang mana Amerika Serikat akan menunggu Korea Utara untuk membuat keputusan denuklirisasi, hal tersebut berkaitan dengan tenggelamnya kapal Korea Utara dan penembakan terhadap Pulau Yeonpyeong di Korea Selatan pada bulan Maret dan November 2010. Kebijakan tersebut dirumuskan di dalam pemerintahan Obama pada bulan Desember 2009 dan telah dicetuskan pada publik oleh Hillary Clinton (VOA, 2009).

Terdapat penjelasan yang telah dikeluarkan oleh *White House* terkait strategi yang akan digunakan oleh masa Presiden Barack Obama pada politik luar negerinya, yang berkaitan dengan strategi keamanan.

“The challenges we face require strategic patience and persistence. They require us to take our responsibilities seriously and make the smart investments in the foundations of our national power. Therefore, I will continue to pursue a comprehensive agenda that draws on all elements of our national strength, that is attuned to the strategic risks and opportunities we face, and that is guided by the principles and priorities set out in this strategy. Moreover, I will continue to insist on budgets that safeguard our strength and work with the Congress to end sequestration, which undercuts our national security.” (House, 2015)

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa Amerika Serikat masa Presiden Obama akan menggunakan strategi kesabaran dalam menghadapi Korea Utara.

Menurut Emma Chanlett Avery, kebijakan tersebut adalah kebijakan yang bertujuan untuk bernegosiasi terhadap Korea Utara dengan menerapkan dua cara pendekatan, yaitu :

- a. Waits atau kesabaran, yaitu usaha diplomasi terhadap Korea Utara untuk bernegosiasi dalam meja perundingan.
- b. Pemberian tekanan terhadap rezim Korea Utara. Unsur utama yang ada didasarkan terhadap pemberian tekanan kepada Pyongyang untuk berkomitmen mengambil langkah menuju denuklirisasi, berkoordinasi erat dalam perundingan dan perjanjian dengan Jepang dan Korea Selatan, serta pendekatan terhadap China untuk mengambil langkah keras terhadap Korea Utara (Avery & Rinehart, 2014, hal. 6).

Kebijakan tersebut merupakan kebijakan lanjutan dari kebijakan-kebijakan sebelumnya yang sudah ada termasuk sanksi yang sudah diberikan oleh internasional kepada Korea Utara. Kebijakan khusus tersebut lebih mengedepankan pendekatan secara persuasif dengan membuka hubungan diplomatik, mengajak Korea Utara untuk kembali masuk ke dalam Six Party Talks dengan point prioritas, yakni melanjutkan komitmen untuk denuklirisasi, kemauan untuk terlibat (berdasarkan beberapa kondisi), dedikasi kepada tujuan-tujuan yang ada pada kesepakatan Six Party Talks, dan berusaha untuk bekerja atas dasar prinsip multilateral untuk memberikan sanksi dan menekan Korea Utara (Pritchard & H., 2010). Pada dasarnya, kebijakan ini lebih berbeda dari kebijakan sebelumnya yang sarat akan hubungan langsung antar negara (Defense, 2010). Penerapan kebijakan Strategic Patience merupakan respon Amerika Serikat masa Presiden Obama terhadap permasalahan nuklir Korea utara. Kebijakan yang lebih menekankan pada kedudukan pasif dalam mengambil tindakan. Terbukti dari peran Amerika Serikat yang menunggu tindakan-tindakan apa yang dilakukan oleh Korea Utara terhadap program nuklirnya untuk dijadikan fokus tindakan apa yang akan diambil selanjutnya.

Pentagon merilis data dari badan *Ballistik Missile Defense Review* pada bulan Februari 2010, bahwa Korea Utara tetap

melanjutkan program pengembangan nuklir yang dimilikinya serta misil dengan lintasan yang sama. Dengan adanya laporan tersebut, menyatakan bahwa Korea Utara akan memiliki kapabilitas dan kapasitas untuk meluncurkan nuklir ke negara-negara tetangganya, bahkan diprediksi Korea Utara memiliki roket yang bisa menjangkau sampai teritorial Amerika Serikat . Adanya *Strategic Patience* yang telah dikemukakan Presiden Amerika Serikat Barack Obama memiliki karakteristik utama, yaitu bersikap reaktif terhadap pengembangan nuklir Korea Utara, namun tetap bersikap agresif secara multilateral dalam hal menekan Korea Utara. Strategi tersebut merupakan doktrin Amerika Serikat oleh Barack Obama. Merupakan strategi keamanan nasional Amerika Serikat masa Presiden Barack Obama.

Berdasarkan kebijakan tersebut, Amerika Serikat mengatakan bahwa negaranya sedang mencari kesepakatan yang tepat dengan Korea Utara agar Korea Utara menghentikan program nuklirnya dengan imbalan bantuan ekonomi dan kemanusiaan. Di waktu yang sama, kebijakan tersebut dikawal dengan latihan militer dengan skala yang besar, dengan tujuan untuk diperlihatkan ke Korea Utara terkait kekuatan militer yang dimiliki Amerika Serikat. Setelah sekian banyaknya proses yang naik dan turun dalam proses penghentian program nuklir Korea Utara, dalam strategi ini Amerika Serikat menempatkan posisi negaranya sebagai negara yang merespon, bukan yang memulai aksi. Dilain sisi, Amerika Serikat gencar memberikan pengaruhnya di kawasan Asia Timur, terutama negara tetangganya Korea Selatan dan Jepang, dan tak terkecuali memasifkan kehadirannya dengan Korea selatan. Sehingga dalam *Strategic Patience*, Amerika Serikat melakukan beberapa kerjasama dengan negara-negara yang dekat dengan Korea Utara.

Kerjasama yang telah dilakukan Amerika Serikat terhadap negara-negara yang dekat dengan Korea Utara yaitu seperti Korea Selatan, Jepang, dan China. Korea Selatan dan Jepang sendiri merupakan negara sekutu bagi Amerika Serikat,

sehingga perlu adanya kerjasama Trilateral untuk menghadapi krisis nuklir yang ada di Korea Utara. Sedangkan China sendiri, merupakan negara yang kurang memiliki hubungan baik dengan Amerika Serikat, sehingga perlu adanya Amerika Serikat melakukan peningkatan hubungan yang lebih baik untuk mengatasi nuklir Korea Utara. Karena China sendiri merupakan negara yang memiliki hubungan baik serta mitra bagi Korea Utara.

Amerika Serikat memberikan garis bawah, bahwa ancaman yang datang dari Korea Utara belum berakhir hingga 50 tahun terakhir. Hal tersebut berlaku tidak hanya untuk Amerika Serikat, namun negara-negara yang berdampingan dengan Korea Utara juga mengalami adanya ancaman. Korea Selatan sendiri berada pada barisan depan dalam hal melakukan perlawanan terhadap Korea Utara, dimana konflik konflik yang ada merupakan warisan dari Perang Dingin. Memberikan perhatian khusus oleh dunia internasional ketika mekanisme diplomasi multilateral yang tertuang dalam *Six Party Talks* pada akhirnya tidak memberikan hasil yang signifikan (Calder, 2013). Kondisi yang ada pun tentunya memberikan dilema tersendiri bagi negara sekitarnya seperti Korea Selatan, Jepang, dan bahkan Amerika Serikat ketika suatu tatanan keamanan kawasan harus berhadapan dengan ancaman senjata nuklir dari Korea Utara.

Fenomena tersebut pada akhirnya menuntut sebuah pengkajian ulang terhadap keamanan kawasan di Asia Timur bahwa melalui strategi pertahanan bilateral masih dianggap sudah tidak lagi relevan menghadapi ancaman nuklir Korea Utara yang semakin mengalami kemajuan. Dengan begitu, nuklir Korea Utara memaksa Amerika Serikat beserta sekutunya berupaya membuat strategi baru dengan mengedepankan paradigma trilaterisme. Kesepakatan tersebut membuat penyatuan Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Jepang. Ancaman yang ada di kawasan tak terlepas dari adanya China sebagai mitra strategis Korea Utara. Dengan keterlibatan China didalamnya, juga memiliki tujuan untuk melakukan

balancing serta adanya upaya untuk melemahkan hegemoni yang dimiliki Amerika Serikat. Hal tersebutlah yang menjadi alasan penting mengapa transformasi paradigma menuju kerjasama trilateralisme sangat dibutuhkan untuk landasan yang akan mengakomodasi kerja sama pertahanan menyeluruh bagi Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan (Park, 2015).

Adanya kerjasama trilateral bagi ketiga negara merupakan salah satu kebijakan Barack Obama yang mulai berlaku dari tahun 2009 hingga akhir masa Barack Obama sebagai Presiden Amerika Serikat. Berbagai macam program kerjasama seperti dalam pertahanan, baik dalam bentuk joint military exercise, joint patrol, maupun military assistance akan diperluas dengan adanya instrumen-instrumen baru seperti cyber war dan teknologi intelligence yang nantinya tidak hanya berguna untuk melacak informasi terbaru dari pengembangan nuklir Korea Utara, namun juga dapat digunakan untuk meretas situs atau berbagai macam sistem komputerisasi yang dimiliki Korea Utara.

Presiden Obama dengan Presiden Park dan Perdana Menteri Abe telah mengadakan pertemuan trilateral di Washington DC. Pertemuan tersebut menghasilkan persetujuan untuk menerapkan secara keseluruhan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2270. Selain itu para pemimpin negara tersebut sepakat bahwa perlu adanya untuk meyakinkan Korea Utara, bahwa senjata nuklir tidak akan membantu negara tersebut (KBSWorldRadio, 2016). Ketiga negara juga akan berkoordinasi dengan forum-forum multilateral lainnya termasuk PBB juga seperti KTT Asia Timur, *International Civil Aviation Organization* (ICAO), dan *International Maritime Organization* (IMO). Hal tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa negara-negara lain juga ikut bergabung dalam mengutuk tindakan provokatif yang telah dilakukan Korea Utara terkait rezim nuklirnya.

Selain itu, ketiga negara juga melakukan kerjasama dalam bidang militer. Pertemuan yang dilakukan di Departemen

Pertahanan AS yang dipimpin oleh Kepala Staff Gabungan Militer AS, Jenderal Joseph Dunford yang bertemu dengan Pasukan Militer Terpadu SDF (*Self-Defense Forces*) Jepang Laksamana Katsutoshi Kawano, dan Kepala Staff Gabungan Korea Selatan Lee Sun-jin tersebut, memiliki kerjasama dalam berbagai informasi rahasia terkait program nuklir yang dimiliki Korea Utara. Amerika Serikat memberikan komitmennya bahwa akan membela Jepang dan Korea Selatan dan akan menggunakan kemampuan militernya mulai dari konvensional, nuklir, hingga pertahanan rudal guna menangkal nuklir yang dimiliki Korea Utara (Malau, 2016)

Kerjasama yang kedua yaitu meningkatkan hubungan baik dengan China. Kerjasama yang dilakukan Presiden Obama tersebut dilakukan pada tahun 2016. Presiden Amerika Serikat Barack Obama dan presiden China Xi Jinping telah berjanji akan melaukan kerjasama dalam menghadapi ancaman nuklir Korea Utara, sambil bekerja untuk mempersempit perbedaan yang terus terjadi mengenai keamanan dunia maya, hak asasi manusia, dan konflik maritim. Obama membuka pertemuan puncak keamanan global terkait nuklir di Gedung Putih bersama dengan para pemimpin Jepang dan Korea Selatan dalam menyerukan langkah-langkah bersama untuk mencegah Korea Utara. Bahwasannya presiden Obama dengan Xi Jinping akan berkomitmen untuk melakukan denuklirisasi di Semenanjung Korea. Amerika Serikat sendiri telah lama mendesak China sebagai sekutu tradisional Korea Utara untuk mengambil peran yang lebih kuat dalam menekan Korea Utara agar menghentikan program senjata nuklirnya. Pemerintah Obama dengan dukungan peran China mampu meloloskan sanksi ketat dari PBB yang mana memberikan hukuman terhadap Korea Utara, dan Amerika Serikat juga mendesak agar China dapat berperan dalam menerapkan sanksi-sanksi tersebut dengan patuh (SouthChinaMorningPost, 2016). Dari pemimpin China Xi Jinping pun mengatakan kepada Presiden Obama bahwa semua pihak harus menghindari kata-kata atau tindakan apa pun yang dapat meningkatkan ketegangan di Semenanjung

Korea dan tidak melakukan apa pun yang dapat mempengaruhi kepentingan keamanan negara lain.

Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh Gedung Putih, disebutkan bahwa kedua negara bertekad akan meningkatkan kerjasama dan memperkuat koordinasi dalam mencapai denuklirisasi di Semenanjung Korea, termasuk melalui penerapan secara penuh resolusi Dewan Keamanan PBB no. 2270, serta resolusi lainnya yang masih berkaitan. Gedung Putih percaya bahwa China dapat berbuat lebih banyak untuk memberikan tekanan terhadap Korea Utara untuk meninggalkan program nuklir dan rudal yang dimiliki. Namun China memiliki kekhawatiran jika terlalu menekan akan memberikan dampak negatif yang akan mendorong ketidakstabilan dan pergolakan di daerah (KBSWorldRadio, Presiden Obama dan Xi Bahas Ancaman Korea Utara di APEC, 2016).

Perdana Menteri China Li Keqiang mengatakan kepada presiden Obama bahwa Beijing mendukung kerjasama yang lebih erat di Dewan Keamanan PBB dan dalam upaya penegakkan hukum guna menghentikan program nuklir Korea Utara. Hal tersebut dapat menjadi sinyal Beijing akan mendukung sanksi yang lebih keras lagi terhadap Korea Utara yang telah melakukan uji coba nuklir yang kelima kalinya. Membuat China menjadi semakin kesal dengan perilaku Pyongyang dan konsekuensinya. Selama pertemuan antara Li dan Obama di sela-sela sidang Majelis Umum PBB tahunan di New York pada tanggal 20 September 2016, kedua pemimpin negara mengutuk uji coba nuklir yang dilakukan Korea Utara pada tanggal 9 September dan memutuskan untuk memperkuat koordinasi dalam pencapaian denuklirisasi di Semenanjung Korea. Li juga menegaskan selama pembicaraannya dengan Obama bahwa pemerintahannya menolak untuk penyebaran perisai rudal yang ada di Korea Selatan, dan meminta agar semua pihak untuk menahan diri dari setiap kegiatan yang mungkin dapat meningkatkan ketegangan di wilayah tersebut

(SouthChinaMorningPost, China, US to step up cooperation to halt North Korea's nuclear weapons programme, 2016).

Sebagai kebijakan yang reaktif terhadap perkembangan nuklir Korea Utara, dalam *Strategic Patience* juga menempatkan Amerika Serikat sebagai negara yang harus melakukan pertahanan. Sehingga dengan kepercayaan Amerika Serikat bahwa nantinya Korea Utara memiliki rencana menembakkan rudal nuklirnya di daratan Amerika Serikat, maka diperlukannya sebuah sistem pertahanan yang bisa menangkal rudal yang nantinya sewaktu-waktu bisa dikirimkan oleh Korea Utara melalui sistem anti rudal yang dimiliki Amerika Serikat. Sistem anti rudal milik Amerika Serikat yang canggih yaitu *Terminal High Altitude Area Defense* (THAAD).

Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) adalah sistem pertahanan rudal yang unik dan canggih dengan presisi yang tak tertandingi, juga mampu melawan ancaman di seluruh dunia dengan mobilitas tinggi dan penempatan baterai unit strategis. Dibangun oleh Lockheed Martin dan disebut sebagai sistem rudal paling canggih dari sistem lainnya. THAAD bisa berburu dan meledakkan rudal musuh dengan tingkat keberhasilan 100%. Tidak memiliki hulu ledak yang berarti dan hanya menggunakan energi kinetik murni untuk menghancurkan rudal musuh yang dihantamnya (Pagi, 2016).

Konsep dari pertahanan dengan THAAD merupakan usulan yang dicetuskan pada tahun 1987, yang mana permintaan secara formal terkait proposal konsep yang diajukan dalam industri ada pada tahun 1991. Adnya program tersebut, THAAD mendapat manfaat dari hasil upaya pertahanan rudal sebelumnya, yaitu *High Endoatmospheric Defence Interceptor* (HEDI) dan *The Kinetic Kill Vehicle Integrated Technology Experiment* (KITE) (Atkinson, 1996). Pada bulan September 1992, Angkatan Darat lebih memilih Martin Marietta yang saat ini disebut Lockheed Martin sebagai kontraktor utama dalam pengembangan prototipe fisik, kemudian perangkat lunak *Aero Optical Effect* (AOE) dikembangkan untuk memvalidasi profil

operasional dari desain Lockheed. Tes awal THHAD pada bulan April 1995 dengan semua uji penerbangan dalam fase program demonstrasi validasi (DEM-VAL) yang terjadi di White Sands Missile Range.

Rudal THAAD diproduksi di fasilitas Lockheed Martin dekat dengan wilayah Try, Alabama. Didalam fasilitas tersebut, dilakukan integrasi akhir, perakitan dan pengujian dilakukan. Radar yang ada pada THAAD adalah X-Band aktif yang dipindai secara elektronik, array yang ada pun dikembangkan dan dibangun oleh Raytheon di Andover, Massachusetts Integrated Air Defense Facility (Agency, 2012). Pada akhir tahun 2006 dan awal tahun 2007, radar yang dimiliki THAAD sudah dapat beroperasi menggunakan sistem Aegis dan Patriot, melalui pertahanan anti missil dengan 3 lapisan. Pada tanggal 15 Agustus 2012, Lockheed mendapatkan kontrak sebesar USD 150 juta dari Missile Defense Agency (MDA) untuk memproduksi peluncur sistem senjata rudal THAAD serta peralatan kontrol penembakan dan komunikasi untuk Angkatan Darat Amerika Serikat (release, 2012).

Amerika Serikat percaya bahwa nantinya Korea Utara akan menembakkan rudal nuklirnya ke daratan Amerika. Dengan ancaman tersebut, Deputy Direktur Urusan Politik Militer Asia di Departemen Pertahanan Amerika Serikat David Stiwell, mengatakan bahwa kondisi tersebut telah menciptakan suatu kebutuhan akan sistem pertahanan dari rudal Korea Utara yakni THAAD dan untuk ditempatkan di Semenanjung Korea sebagai perlindungan di wilayah sekutu, pasukan Amerika Serikat, dan wilayah Amerika Serikat sendiri. Dalam menghadapi adanya potensi ancaman rudal balistik di kawasan Asia Timur khususnya dari Korea Utara, Amerika Serikat telah membuat suatu alat pertahanan rudal balistik yaitu *Ballistic Missile Defense* (BMD) sebagai komponen utama dalam perlindungan terhadap pasukan tentara Amerika Serikat yang ditempatkan di kawasan tersebut dan juga diseluruh dunia yang menjadi sekutu Amerika. Aset-aset BMD-nya pun dikerahkan dengan mengirimkan dua kapal perusak yang telah dilengkapi dengan

fasilitas persenjataan anti rudal ke pasifik barat, serta juga telah mengerahkan sistem anti rudal THAAD dan PAC-3 ke wilayah Alaska dan Guam. Kerjasama BMD juga dilakukan dengan negara-negara dikawasan Asia Timur seperti Jepang dan Korea Selatan agar dapat menyebarkan sistem pertahanan dikawasan tersebut (Bubnova, 2013, hal. 293).

Pada bulan Juni tahun 2009, Amerika Serikat pada masa Presiden Obama, mengerahkan unit THAAD ke Hawaii, bersamaan dengan Radar berbasis laut SBX yang digunakan untuk mempertahankan diri dari kemungkinan nuklir Korea Utara yang menargetkan Amerika Serikat (Gienger, 2009). Kemudian pada bulan April 2013, Amerika Serikat menyatakan bahwa Alpha Battery, yaitu Resimen Artileri Pertahanan Udara ke-4 akan dikerahkan ke Guam guna untuk mempertahankan wilayah dari kemungkinan serangan IRBM Korea Utara yang menargetkan pulau tersebut (Burge, 2013).

Pada tanggal 17 Oktober 2013, militer Korea Selatan meminta terhadap Pentagon untuk memberikan informasi terkait sistem THAAD dari harga dan kemampuan yang dimilikinya sebagai bagian untuk menangkal serangan rudal balistik Korea Utara (ArmyRecognition, 2013). Namun pemerintah Korea Selatan dari Park Geun-hye memutuskan akan mengembangkan sendiri dengan alih-alih membeli THAAD. Pejabat Kementerian Pertahanan Korea Selatan sebelumnya meminta informasi mengenai THAAD serta pencegat rudal lainnya seperti Arrow 3 Israel, dengan tujuan untuk meneliti sistem guna bahan untuk mengembangkan teknologi domestik daripada membelinya. Namun dari para pejabat menyatakan bahwa penyebaran Amerika Serikat dari sistem THAAD akan membantu dalam menangani ancaman rudal Korea Utara (KBSWorldRadio, 'S.Korea Requested Information on THAAD to Develop L-SAM', 2014). Pada bulan Mei 2014, pihak Pentagon mengungkapkan bahwa pihaknya sedang mempelajari lokasi untuk penanaman baterai THAAD di Korea Selatan.

Pada bulan Juli 2016, para pejabat militer Amerika dan Korea Selatan sepakat untuk menggunakan sistem pertahanan rudal THAAD di negara tersebut guna menangkal serangan yang datang dari Korea Utara yang semakin menunjukkan peningkatan dalam melakukan uji coba rudal balistik dan nuklir. Setiap unit THAAD terdiri dari 6 peluncur yang dipasang di truk, 48 pencegat, 1 unit kontrol kebakaran dan komunikasi, dan sebuah radar AN/TPY-2 (Judson, 2016). Kabupaten Seongju di Provinsi Gyengsang Utara menjadi tempat sebagai situs THAAD, dan sebagian karena berada jauh diluar jangkauan artileri roket Korea Utara yang ada di sepanjang DMZ. Namun, hal tersebut mendapatkan protes dari warga karena dikhawatirkan akan memberikan radiasi yang dipancarkan oleh Radar AN/TPY-2 dapat mengganggu kesehatan mereka, dan dapat merusak tanaman melon oriental yang sangat terkenal di kawasan tersebut (Padden, 2016). Sehingga pada tanggal 30 September 2016, Amerika Serikat dan Korea Selatan akan memindahkan THAAD ke Lotte Skyhill Seongju Country Club, daerah yang lebih jauh dari perumahan utama kota dan memiliki ketinggian yang lebih tinggi dari tempat sebelumnya, guna meredakan kekhawatiran warga.

Untuk Jepang sendiri, pada bulan November 2015, Menteri Pertahanan Jepang Jenderal Nakatani menyampaikan bahwa ia akan mempertimbangkan Amerika Serikat dalam menyebarkan THAAD di Jepang guna melawan ancaman rudal balistik Korea Utara (ArmyRecognition, Japan is considering deployment of US missile defense system including the THAAD 42411153 , 2015). Namun, hingga bulan Oktober 2016, Jepang masih mempertimbangkan untuk pembelian THAAD atau Aegis Ashore dalam hal untuk menambah lapisan pertahanan rudal baru (Kubo & Kelly, 2016).

Jika dibandingkan dengan sikap Amerika Serikat era sebelum Obama, dalam *Strategic Patience* dapat dikatakan lebih cermat bila dihitung dengan wacana ideal kebijakan yang mengutamakan pengaruh di kawasan tersebut. Namun, kebijakan ini juga memiliki kelemahan, yaitu memberikan

keleluasan waktu terhadap Korea Utara untuk mengatur segala agenda yang mereka miliki, hal tersebut bertentangan dengan opsi diplomatik yang dimiliki Amerika Serikat. Selanjutnya, Amerika Serikat akhirnya menempatkan dirinya beserta aliansinya untuk lebih bersikap reaktif (Avenson, 2010, hal. 1-2). Akibat dari pengaruh *Strategic Patience* adalah menguatnya pengaruh militer yang dimiliki Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan di Laut Kuning.

B. Menjatuhkan Sanksi Terhadap Korea Utara

Presiden AS Barack Obama, Presiden Korea selatan Park Geun-hye, dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe telah sepakat untuk sama-sama mengambil langkah yang signifikan, termasuk sanksi baru untuk menunjukkan kepada Korea Utara bahwa ada konsekuensi terhadap setiap tindakan yang melanggar hukum dan berbahaya. Ketiga negara telah mengadakan rapat tertutup dengan Dewan Keamanan PBB, yang mana Dewan Keamanan sangat mengutuk uji coba rudal yang dilakukan Korea Utara.

Beberapa sanksi yang telah dijatuhkan Amerika Serikat pada masa Presiden Barack Obama seperti telah dibekukannya aset pemerintah Korea Utara yang ada di Amerika Serikat, Dewan Keamanan PBB juga telah menjatuhkan sanksi serta perintah untuk menginspeksi seluruh kargo yang datang maupun meninggalkan Korea Utara baik melalui darat, laut, dan udara. Dari Departemen Keuangan Amerika Serikat juga telah menjatuhkan sanksi terhadap Kim Jong Un dan 10 petinggi Korea Utara lainnya yakni dengan pembekuan aset-aset mereka di Amerika Serikat dan melarang warga Amerika Serikat untuk berbisnis dengan Kim Jong Un (Sanders-Zakre, 2018).

Hingga tahun 2013, Amerika Serikat mendapatkan dukungan dari Dewan Keamanan PBB untuk memberikan sanksi kepada Korea Utara karena aktifitas uji coba nuklirnya, yaitu dikeluarkannya resolusi Dewan Keamanan PBB no. 2094. Tidak jauh berbeda dengan resolusi-resolusi sebelumnya yang telah dikeluarkan Dewan Keamanan PBB terkait nuklir Korea

Utara, yaitu secara tegas mengutuk atas uji coba nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara dan meminta agar negara tersebut untuk menghapus semua senjata pemusnah masal yang dimilikinya (Council, 2013). Selain memberikan sanksi tegas terhadap Korea Utara yang diberlakukan secara umum, Dewan Keamanan PBB juga menerapkan sanksi terhadap beberapa pihak secara individual yang telah ikut terlibat dalam program pengembangan nuklir Korea Utara. Sanksi individual tersebut yakni berupa larangan bepergian atau berkunjung keluar negeri serta pembekuan aset yang dimiliki. Adapun inti dari dikeluarkannya resolusi tersebut adalah untuk menekan akses-akses Korea Utara dalam mengembangkan program nuklirnya (Davenport, 2013).

Beberapa nama yang telah masuk ke dalam daftar yang terkena sanksi antara lain, Yon Chong-nam dan Ko Chol-chae, keduanya merupakan petinggi yang ada di *Korea Mining Development Trading Corporation* (KOMID), yaitu sebuah lembaga yang mengurus bentuk penjualan senjata di Korea Utara. Selain mereka berdua, terdapat nama lain, yaitu Mun Chong-chol, adalah petinggi di Tanchon Commercial Bank (TCB). Bank tersebut juga terindikasi sebagai pendukung program nuklir Korea Utara, sehingga aset yang dimiliki pun dibekukan oleh resolusi 2094. Selain itu terdapat aset lain yang juga dibekukan, yaitu Second Academy of Natural Sciences yang merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang penelitian dan pengembangan nuklir Korea Utara. Selanjutnya adalah Korea Complex Equipment Import Corporation, yaitu sebuah perusahaan yang mendukung industri senjata nuklir Korea Utara (Council, Security Council Strengthens Sanctions on Democratic People's Republic of Korea, in Response to 12 February Nuclear Test, 2013).

Selain sanksi-sanksi yang diberikan berupa pembekuan aset dan larangan bepergian keluar negeri, terdapat sanksi lain yang berlaku pada resolusi 2094, yaitu larangan transaksi jual beli barang mewah berupa perhiasan seperti permata, berlian, zamrud, dan mutiara. Larangan transaksi pun juga berlaku

untuk jual beli terhadap alat transportasi mewah seperti kapal pesiar, gerbong kereta, dan mobil racing. Pada dasarnya, sanksi yang diberikan tersebut hampir mirip seperti apa yang sudah diberlakukan terhadap nuklir Iran, yang mana dinilai cukup berhasil menekan Iran. Selain itu juga, duta besar Amerika Serikat untuk PBB mengatakan bahwa sanksi tersebut merupakan sanksi yang paling berat bagi Korea Utara (Mustafaga, 2013).

Kemudian pada tanggal 6 Januari 2016, Korea Utara melakukan uji coba nuklirnya yang ke empat, sehingga mendapatkan kecaman dunia internasional dan terkhusus oleh Amerika Serikat. Dewan Keamanan PBB pun melakukan pertemuan pada tanggal 2 Maret 2016. Adapun hasil dari pertemuan tersebut adalah menetapkan sanksi baru bagi Korea Utara, yaitu Resolusi Dewan Keamanan PBB no. 2270 (Council, Security Council Imposes Fresh Sanctions on Democratic People's Republic of Korea, Unanimously Adopting Resolution 2270 (2016), 2016). Resolusi tersebut mendapat dukungan para anggota di PBB, terutama Amerika Serikat yang menyatakan persetujuannya atas dikeluarkannya resolusi tersebut.

Secara umum mungkin tuntutan yang diminta dari Dewan Keamanan PBB masih sama dengan yang sebelumnya, namun pada resolusi tersebut dapat dikatakan sangat lengkap. Adapun isi dari resolusi tersebut adalah larangan uji coba nuklir Korea Utara dan meminta Korea Utara untuk menghentikan segala bentuk pengembangan senjata pemusnah massal tanpa ada pengecualian. Sanksi terbaru yang diberlakukan untuk Korea Utara ini memang diatur sedemikian rupa untuk menyasar jantung ekonomi Korea Utara. Hal tersebut memang sengaja dilakukan sebagai bentuk peringatan terhadap Korea Utara yang selalu mengabaikan setiap resolusi Dewan Keamanan PBB terkait uji coba nuklirnya. Selain dari itu, sanksi terbaru ini merupakan upaya agar Korea Utara mau untuk kembali diajak bernegosiasi di meja perundingan (Berger, 2016).

Pada resolusi tersebut, Dewan Keamanan PBB sangat tegas dalam memberikan sanksi terhadap Korea Utara. Bahkan untuk sanksi yang diberikan sangat spesifik, baik terhadap negaranya, maupun individualnya, serta aset-aset yang dimiliki. Setiap negara dilarang memiliki kerjasama, transaksi, atau membantu Korea Utara dalam bentuk apapun terkait hal-hal yang bersangkutan dengan senjata nuklir Korea utara. Bahkan dunia internasional juga dilarang untuk mengajarkan kedisiplinan ilmu kepada warga Korea Utara yang berkaitan dengan senjata nuklir. Terdapat beberapa nama yang mendapatkan sanksi larangan bepergian keluar negeri dan pembekuan aset terkait program pengembangan senjata nuklir Korea Utara.

Selain sanksi yang diberikan secara individu, melalui resolusi Dewan Keamanan PBB no. 2270, juga melarang adanya transaksi yang berkaitan dengan barang mewah seperti jam tangan mewah yang terbuat dari logam mulia dan mahal, alat transportasi seperti kapal yang digunakan untuk berlibur, Snowmobile yang harganya melebihi dari USD 2000, peralatan yang terbuat dari kristal, dan perlengkapan untuk olahraga atau rekreasi.

Tabel 4.3.1

Berikut merupakan nama-nama individu yang mendapat sanksi *Travel Ban/ Asset Freeze*:

No	Nama	Jabatan
1	Choe Chun-sik	Direktur <i>Second Academy of Natural Sciences (SANS)</i> , Ketua program misil jarak jauh Korea Utara
2	Choe Song-il	Pimpinan <i>Tanchon Commercial Bank</i> di Vietnam
3	Hyon Kwang-il	<i>Department Director for Scientific Development at the National Aerospace Development Administration</i>
4	Jang Bom-su	Pimpinan <i>Tanchon Commercial Bank</i> di Suriah
5	Jang Yong-son	Pimpinan <i>Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID)</i> di Iran
6	Jon Myong-guk	Pimpinan <i>Tanchon Commercial Bank</i> di Suriah
7	Kang Mun-kil	Penanggungjawab aktivitas pengembangan nuklir di Namhung
8	Kang Ryong	Pimpinan <i>Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID)</i> di Suriah
9	Kim Jong-jong	Pimpinan <i>Tanchon Commercial Bank</i> di Vietnam
10	Kim Kyu	Pimpinan <i>Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID)</i> bidang urusan luar negeri
11	Kim Tong-myong	Presiden <i>Tanchon Commercial Bank</i>
12	Kim Yong-chol	Pimpinan <i>Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID)</i> di Iran
13	Ko Tae-hun	Perwakilan <i>Tanchon Commercial Bank</i>
14	Ri Nab-gon	Menteri Industri Perlengkapan Perang Korea Utara
15	Ryu Jim	Pimpinan <i>Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID)</i> di Suriah
16	Yu Chol-u	<i>Director of the National Aerospace Development Administration</i>

Sumber : United Nations Security Council, Resolution 2270, 2016

Tabel 4.3.2
Berikut merupakan daftar aset Korea Utara yang
dibekukan:

No	Entitas	Deskripsi
1	Akademi Ilmu Pertahanan Nasional (<i>Academy of National Defense Science</i>)	Merupakan akademi Yang mendukung penelitian terkait program nuklir Korea Utara
2	<i>Chongchongang Shipping Company</i>	Perusahaan tersebut menggunakan kapalnya dalam melakukan pengiriman senjata konvensional ke Korea Utara pada Juli 2013
3	<i>Daedong Credit Bank (DCB)</i>	DCB tersebut telah memberikan fasilitas terhadap ratusan transaksi keuangan atas nama KOMID dan <i>Tanchon Commercial Bank</i> , dimana kedua lembaga tersebut memiliki hubungan dengan nuklir Korea Utara
4	<i>Hesong Trading Company</i>	HTC merupakan anak perusahaan KOMID yang mendukung program nuklir Korea Utara
5	<i>Korea Kwangson Banking Corporation (KKBC)</i>	KKBC menyediakan jasa keuangan dalam rangka mendukung kegiatan yang berhubungan dengan program nuklir Korea Utara
6	<i>Korea Kwangsong Trading Corporation (KKTC)</i>	KKTC merupakan anak perusahaan <i>Korea Ryongbong General Corporation</i> yang telah banyak mendukung program nuklir Korea Utara
7	<i>Ministry of Atomic Energy Industry</i>	Kementerian Industri Energi Atom yang dibentuk tahun 2013 dengan tujuan untuk modernisasi industri nuklir Korea Utara. Selain itu juga membawahi berbagai macam lembaga riset yang berhubungan dengan program nuklir Korea Utara

8	<i>Munitions Department</i>	<i>Industry</i>	Departemen Industri Perlengkapan Perang Korea Utara ini merupakan aspek kunci dari program misil Korea Utara. Bertanggungjawab dalam hal pengembangan rudal balistik Korea Utara
9	<i>National Development Administration (NADA)</i>	<i>Aerospace Administration</i>	Merupakan lembaga yang bertugas untuk pembangunan ilmu teknologi luar angkasa Korea Utara, termasuk didalamnya terkait peluncuran satelit dan roket
10	Office39		Biasa disebut sebagai <i>Central Committee Bureau 39</i> , merupakan salah satu lembaga yang mendukung program nuklir Korea Utara
11	<i>Reconnaissance Bureau</i>	<i>General</i>	Merupakan badan intelijen Korea Utara yang dibentuk awal tahun 2009
12	<i>Second Economic Committee</i>		Merupakan salah satu aspek terpenting dalam program misil dan nuklir Kora Utara, Lembaga ini juga bertanggung jawab mengawasi produksi rudal balistik Korea Utara

Sumber : United Nations Security Council, Resolution 2270, 2016.

Selain dari 12 entitas yang disebutkan diatas, melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB 2270 juga merilis bahwa Kapal Korea Utara juga masuk sebagai dalam daftar hitam dari sanksi tersebut. Terdapat 31 kapal yang dimiliki perusahaan pelayaran Korea Utara yaitu *Ocean Maritime Management Compsny (OMM)*. Kemudian segala bentuk muatan yang masuk dan keluar dari Korea Utara harus diperiksa terlebih dahulu.